

Pengaruh Strategi Keamanan Nasional Transformasional Jepang Terhadap Keamanan Regional Asia Timur

The Influence of Japan's Transformational National Security Strategy on East Asian Regional Security

Karisma¹, Agussalim Burhanuddin², Ishaq Rahman³

¹ Bachelor Program of International Relations, Hasanuddin University, Makassar, Indonesia

^{2,3} Department of International Relations, Hasanuddin University, Makassar, Indonesia

Correspondent Author: immakharisma7@gmail.com

ARTICLE INFO	ABSTRACT
Keywords: Japan's 2022 Transformation National Security Strategy, National Security, Security Escalation, East Asia Kata Kunci: Transformasi Strategi Keamanan Nasional Jepang 2022, Keamanan Nasional, Eskalasi Keamanan, Asia Timur How to Cite: Karisma, Burhanuddin, A., & Rahman, I. The Influence of Japan's Transformational National Security Strategy on East Asian Regional Security. <i>Journal of Peace, Security and Democracy</i>, 1(2), 21-48. DOI: 10.63280/jpsd.v1i2.43491	The Transformation of Japan's National Security Strategy for 2022 is a form of Japan's defense and security policy which includes the National Security Strategy, National Defense Security and the Defense Development Program in East Asia. The type of research used in this research is qualitative with data obtained through literature studies from a number of books, journals and official documents that relate accurately to the problems studied. The results of this research show that the transformation policy of Japan's 2022 National Security Strategy triggers various responses from target countries. China responded by increasing the PLA and military modernization in the disputed Islands and Taiwan Strait. North Korea hints at a military attack in the form of nuclear and missiles if it threatens its fundamental policies. Russia carried out provocative actions based on joint military exercises and military bases on the Kuril Islands in dispute with Japan.

	Abstrak Transformasi Strategi Keamanan Nasional Jepang Tahun 2022 merupakan bentuk kebijakan pertahanan dan keamanan Jepang yang meliputi Strategi Keamanan Nasional, Keamanan Pertahanan Nasional dan Program Pengembangan Pertahanan di Asia Timur. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan data yang diperoleh melalui studi pustaka dari sejumlah buku, jurnal dan dokumen resmi yang berhubungan secara akurat dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan transformasi Strategi Keamanan Nasional Jepang Tahun 2022 memicu berbagai respon dari negara sasaran. China merespon dengan meningkatkan PLA dan modernisasi militer di Kepulauan yang disengketakan dan Selat Taiwan. Korea Utara mengisyaratkan serangan militer berupa nuklir dan rudal jika mengancam kebijakan fundamentalnya. Rusia melakukan tindakan provokatif berdasarkan latihan militer gabungan dan pangkalan militer di Kepulauan Kuril yang disengketakan dengan Jepang. Copyright © 2025 JPSD. All rights reserved.
--	---

Pendahuluan

Meluasnya pengaruh fenomena perang dan konflik antar negara pada dekade terakhir telah mengubah sudut pandang setiap negara terhadap esensialitas sebuah keamanan sebagai unsur strategis dalam menunjang dan meningkatkan stabilitas negara dengan cakupan jangkauan yang luas dan tidak sekedar terbatas hanya pada sektor pertahanan darat, air dan udara, akan tetapi juga meliputi keamanan dunia maya (*cyberspace*) (Kshetri, 2011). Namun, esensial keamanan negara secara umum lebih merujuk pada penggunaan angkatan kemiliteran dalam menunjang pertahanan secara objektif dibandingkan pertahanan secara substansial. Hal ini dikarenakan jika terjadinya konflik dan perang, maka aspek militer menjadi pilihan strategis sebagai

bentuk offense atau defense sehingga pembangunan kapabilitas militer mulai diagungkan sebagai unsur penting dalam pertahanan dan keamanan, utamanya melindungi kedaulatan negara dari berbagai ancaman dan serangan.

Pengaruh interaksi yang terbentuk antar negara dalam kawasan mampu menciptakan potensi terjadinya konflik yang jauh lebih rentan dibandingkan interaksi antar negara lintas kawasan. Hal tersebut dikarenakan setiap negara berada dalam letak geografis yang strategis dan bersinggungan satu sama lain. Kemudian, adanya rivalitas dan persaingan yang tinggi utamanya dalam hal kapabilitas militer, mempengaruhi terbentuknya pola *amity* dan *enmity* antara negara sehingga menjadikan konsentrasi keamanan semakin meningkat. Akibatnya, *security dilemma* antar negara dalam kawasan pun berkembang semakin kompleks yang secara tidak langsung telah menempatkan setiap negara dalam lingkup anarkisme. Eskalasi keamanan kawasan yang komprehensif hampir ditunjukkan oleh setiap kawasan, termasuk kawasan Asia Timur (Syahrin, 2018).

Secara geopolitik, Asia Timur selalu menarik perhatian dunia sebagai kawasan kontroversial dan kompleks dalam hal perebutan hegemoni dan geopolitik kawasan. Banyaknya polaritas sekutu - aliansi, masalah persinggungan otonomi, perlombaan alutsista hingga kehadiran negara eksternal lainnya menjadikan keadaan kawasan Asia Timur belum sepenuhnya kondusif. Akibatnya mulai mendorong setiap negara di kawasan lebih mementingkan permasalahan keamanan kawasan dengan berfokus pada perkembangan kondisi sekitar sehingga dianggap sebagai sumber ancaman dengan lebih mengedepankan ketidakpercayaan daripada mencari solusi untuk mengantisipasinya.

Terciptanya berbagai konflik berkepanjangan yang dinilai mampu mengancam stabilitas dan keamanan kawasan merupakan hal umum yang terjadi sebagai bentuk interaksi dan persinggungan kepentingan di kawasan Asia Timur seperti masalah Taiwan sebagai fokus ketengangan berkelanjutan, sengketa dan pengklaiman teritorial Jepang- Tiongkok mengenai Kepulauan Senkaku dan Pulau Dokdo oleh Jepang - Korea Selatan, penggunaan nuklir dan pengembangan rudal Korea Utara hingga konflik teritorial di Laut China Selatan dengan kebijakan Strategi *One Belt One Road* untuk meningkatkan hegemoni di kawasan. Terjadinya perlombaan senjata dan

peningkatan kapabilitas militer juga menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan. Pembangunan persenjataan militer secara besar-besaran oleh Tiongkok, Korea Utara, Korea Selatan dan Jepang memberikan konsekuensi terhadap ketidakstabilan dan dilema keamanan regional (Syahrin, 2018).

Selain persinggungan kepentingan antar negara, perkembangan dinamika keamanan kawasan Asia Timur juga tidak terlepas dari adanya kehadiran aktor eksternal yang memiliki hegemoni besar di kawasan ini, yakni Amerika Serikat. Namun, kehadiran Rusia beberapa dekade terakhir nyatanya juga memberikan pengaruh yang kuat terhadap struktural keamanan kawasan Asia Timur. Keterlibatan Rusia di kawasan ini secara tidak langsung dipengaruhi oleh meningkatnya hubungannya dengan Tiongkok semenjak konflik Rusia-Ukraina pada tahun 2021. Bahkan semakin intensif setelah Rusia melakukan latihan militer bersama Tiongkok di perairan Laut China Selatan hingga laut Jepang (France, 2023).

Meningkatnya hegemoni Tiongkok, Korea Utara dan Rusia sebagai pihak eksternal baru dengan pengaruh yang besar tentunya akan menimbulkan kesan ancaman yang kuat bagi negara lainnya di Asia Timur, utamanya dalam hal pertahanan dan keamanan Jepang. Sebagai salah satu negara dengan posisi strategis di Asia Timur tentunya dengan tegas menilai kondisi tersebut sebagai hal yang bisa meruntuhkan pengaruhnya di kawasan. Oleh karena itu, sebagai langkah penting dalam meningkatkan stabilitas pertahanan dan keamanannya, Jepang mulai melakukan transformasi terhadap strategi pertahanan dan keamanan nasionalnya sebagai kebijakan strategis dalam menghadapi regional *security dilemma*, terutama dalam merespons pengaruh Tiongkok, Korea Utara dan Rusia.

Dibawah pemerintah Perdana Menteri Fumio Kishida, sistem pertahanan dan keamanan Jepang meningkat drastis melalui kebijakannya dalam melakukan transformasi strategi pertahanan dan keamanan Jepang. Dalam transformasi *Japan's New Security Strategy* tersebut, PM Fumio Kishida melakukan rekonstruksi dan tambahan terhadap tiga dokumen penting mengenai *national policy* Jepang yang meliputi *National Security Strategy* (NSS), *National Defense Security* (NDS) dan *Defense Buildup Program* (DBP). Melalui tiga dokumen ini akan mengkoordinasikan keseluruhan kekuatan Jepang yang bertujuan untuk menjaga keamanan nasional, kedaulatan dan kemampuan intelijen (Gunawan, 2023).

National Security Strategy lebih memfokuskan pada target sasaran yang dianggap sebagai tantangan terbesar. Dalam hal ini, Jepang menargetkan Tiongkok sebagai “*Unprecedented and the greatest strategic challenge*”, Korea Utara dan Rusia sebagai tantangan strategi terbesar bagi Jepang. Kemudian *National Defense Security*, Jepang mulai mengadopsi strategi Amerika Serikat dalam menanggapi berbagai tantangan militer, peningkatan anggaran militer sebesar 2% atau senilai 43 Triliun Yen (\$330 Miliar) untuk pertahanan dan keamanan dalam jangka waktu 5 - 10 tahun. Terakhir, Defense Buildup Program membahas rancangan strategis 5 - 10 tahun yang dimaksudkan NDS, keleluasaan *Self Defense Force* melakukan penyerangan ke wilayah musuh melalui strategi “Serangan Balik” dan kerja sama aliansi keamanan Jepang-Amerika Serikat (Koshino, 2022).

Kebijakan *Japan's Transformation National Security Strategy 2022* pada dasarnya diberlakukan guna untuk melindungi keamanan nasional Jepang di tengah kompleksitas keamanan regional Asia Timur dengan tetap berfokus pada prinsip-prinsip pertahanan keamanan Jepang yang bersifat *self-defense* yang meliputi “*Proactive Contribution to Peace*” dengan berlandaskan pada nilai-nilai universal seperti HAM, kebebasan, supremasi dan demokrasi Hukum, negara cinta damai, pemenuhan prinsip non-nuklir dan kepentingan hidup berdampingan bersama negara lain yang berpikiran sama melalui kerjasama. Selain itu, dalam perumusan kebijakan tersebut juga didukung oleh beberapa faktor diantaranya *Diplomatic capabilities, Defense capabilities, Diplomatic capabilities, Economic capabilities dan Technological capabilities* (NSS 2022).

Perubahan terhadap struktur strategi pertahanan dan keamanan Jepang tersebut tentunya memicu berbagai aksi dan reaksi terhadap negara lain terutama bagi negara-negara sasaran. Dalam hal ini, baik Tiongkok, Korea Utara dan Rusia memberikan berbagai reaksi yang berbeda. Bagi Tiongkok, *Japan's Transformation National Security Strategy 2022* menjadikan struktur keamanan regional di Asia Timur menjadi tidak sepenuhnya stabil. Oleh karena itu, Tiongkok turut melakukan perubahan terhadap keamanan nasional yang berfokus peningkatan kapasitas militer dengan meningkatkan anggaran kemiliterannya. Selain sebagai modernisasi pertahanan nasional, kebijakan tersebut juga pada dasarnya merupakan respons Tiongkok dalam

membendung setiap ancaman dan serangan dari ketidakstabilan lingkungan eksternal dan reunifikasi Taiwan (Hidayat, 2023).

Kemudian dari sudut pandang Korea Utara juga mulai merespon dengan melakukan proyeksi peningkatan belanja negara secara menyeluruh terhadap pertahanan nasional. Selain anggaran militer, Korea Utara juga memfokuskan keamanannya terhadap rudal yang dimilikinya dengan melakukan pengesahan anggaran pertahanan tingkat tinggi sehingga uji coba rudal yang dilakukan Korea Utara akan semakin intensif yang meliputi eksponensial hulu ledak yang jauh lebih meningkat, memproduksi massal nuklir taktis dan pengembangan rudal balistik antar benua (Jamil, 2023). Sedangkan bagi Rusia lebih berfokus untuk meningkatkan kedekatannya dengan Tiongkok guna meningkatkan kehadirannya di Asia Timur melalui latihan militer bersama dan penempatan militer sekitar Pulau Kuril (France, 2023).

Hal tersebut telah menunjukkan bahwa fokus Jepang terhadap strategi pertahanan dan keamanan di kawasan Asia Timur semakin meningkatkan di setiap periode bahkan dinilai semakin agresif dan lebih berani yang ditujukan terhadap provokatif tiga negara tersebut yakni Tiongkok, Korea Utara dan Rusia. Hal tersebut dikarenakan semakin meningkatnya hegemoni Tiongkok, Korea Utara dan Rusia sebagai pihak eksternal baru dengan pengaruh yang besar sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya tentunya akan menimbulkan kesan ancaman yang kuat bagi pertahanan dan keamanan Jepang sebagai salah satu negara hegemon di Asia Timur. Bahkan Rusia yang bukan bagian dari kawasan Asia Timur, tetapi memiliki kepentingan di kawasan tersebut dan memiliki persengketaan teritorial dengan Jepang sehingga Rusia juga menjadi objek lainnya untuk dianalisis lebih lanjut dalam penelitian ini.

Oleh karena itu, Dengan melihat adanya implikasi dan aksi-reaksi antar Jepang dengan Tiongkok, Korea Utara dan Rusia di regional Asia Timur melalui transformasi kebijakan pertahanan dan keamanan tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat judul "*Pengaruh Japan's Transformation National Security Strategy 2022 Terhadap Keamanan Regional Asia Timur*". Penelitian ini bertujuan untuk melihat respon Tiongkok, Korea Utara dan Rusia terhadap *Japan's Transformation National Security Strategy 2022* sebagai kebijakan baru Jepang di Asia

Timur.

Kajian Literatur

Teori Offense – Defense Balance

Prospek umum dari teori *Offense-Defense* lebih mengarahkan negara kepada konflik dan perang internasional yang dapat dilihat bahwa konflik dan perang akan mudah terjadi ketika penyerangan (*offense*) yang dilakukan oleh negara lebih besar dan memiliki keuntungan pribadi, begitupun sebaliknya bahwa jika perdamaian dan kerjasama dapat tercipta dengan mudah ketika pertahanan (*defense*) jauh lebih besar memiliki keuntungan. Sehingga dalam berbagai fraksi menyatakan bahwa teori *offense-defense* lebih cenderung digunakan untuk menganalisis perang dan damai dalam sistem internasional dibandingkan politik internasional dan kebijakan luar negeri.

Kenneth N. Waltz dalam "*The Origins of War in Neorealist Theory*," menyatakan "*Weapons and strategies that make defense and deterrence easier, and offensive strikes harder to mount, decrease the likelihood of war*" (Waltz, 1989, p. 50). Dalam hal ini, *Offense-Defense* digunakan oleh negara-negara dalam tatanan sistem internasional untuk mencapai tujuannya secara intensif dalam menghadapi kendala internasional. Adapun tujuan yang dimaksudkan tersebut memerlukan kemampuan militer yang seringkali menimbulkan kesan ancaman. Sehingga untuk bisa mencapai tujuan tersebut, setiap negara mulai memaksimalkan kemampuan pertahanan dan keamanannya yang kemudian mendorong terciptanya lingkup anarkis.

Dengan kata lain, fokus teori *Offense-Defense* mulai meluas dengan mencakupi kemampuan militer dan senjata alusista dengan berfokus pada sistem pertahanan dan keamanan negara yang kemudian menciptakan kondisi anarkis antara terciptanya perang atau damai (Lyn & Jones, 2001). Posisi *Offense-Defense* kemudian dijadikan sebagai bentuk strategi keamanan oleh setiap negara yang ditentukan oleh perilaku dan sudut pandang setiap negara. *Offense* memposisikan keamanan negara dalam hal penambahan sumber daya dan penggunaan militer dengan skala potensial yang kemungkinan besar mengancam keamanan negara lain. Sedangkan *Defense* memposisikan negara melakukan perlindungan yang bertujuan untuk menciptakan

ketidakmungkinan negara lain bisa menguasai teritorial. Biasanya hal tersebut dilakukan dengan meningkatkan alutsista keamanan negara (Nindya & Abiyya, 2022).

Determinan *Offense-Defense* kemudian memberikan pandangan baru konsekuensi jika terjadinya perang yang dapat dicegah. Menurut Glaser & Kauffman bahwa ketika terjadinya perang maka dapat dicegah ketika pengaruh defense mendapatkan dominasi yang lebih dibandingkan pengaruh *offense* dalam skema *Offense-Defense Balance* (Alghifari & Letticia, 2016). Dalam hal ini, untuk menciptakan tatanan hubungan yang seimbang maka hubungan antar negara harus berada dalam posisi yang strategis baik antar *offense-defense*. Oleh karena itu, menurut Van Evera, terdapat setidaknya empat determinan untuk menggambarkan *Offense-Defense Balance* yakni *military technology* dan *doctrine, geography, political and social order, and diplomatic arrangement* (Mustofa, 2020, p. 17-18).

Secara informal, *Offense-Defense Balance* lebih mengacu pada relevansi kemudahan yang bersifat relatif untuk melakukan pertahanan atau serangan. *Offense-Defense Balance* juga dapat didefinisikan sebagai keseimbangan untuk menyerang atau bertahan terhadap tujuan tertentu yang akan dicapai, bentuk konflik yang bisa saja terjadi hingga sekelompok aktor yang terlibat. Namun menurut Jervis, *Offense-Defense Balance* lebih cenderung mengarah ke bentuk serangan dan mampu memperburuk *security dilemma*. Jika semakin mudah melakukan tindak *offense* dibandingkan *defense* maka perasaan terancam satu sama lain semakin besar dan hal tersebut berpengaruh besar terhadap kecenderungan melakukan serangan preventif untuk mengurangi resiko ancaman.

Dalam hal ini, *Offense-Defense Balance* menganalisis Jepang sebagai negara defender melalui kebijakan *Japan's Transformational National Security Strategy 2022* di tengah dinamika keamanan regional Asia Timur dengan menggunakan empat determinan teori ini yakni:

1. Teknologi Militer dan Doktrin: Peningkatan kapasitas militer Jepang dan perubahan yang lebih agresif terhadap sistem pertahanan keamanan di Asia Timur mendorong Jepang melakukan aksi *military buildup*.
2. Geografi: Regional Jepang yang dipisahkan oleh laut menjadikan negara lain untuk melakukan invasi tapi nyatanya *military buildup* Jepang di dorong oleh

meningkatkan kemampuan militer dari Tiongkok dan Korea Utara yang mampu menjangkau wilayah perairan Jepang.

3. Tatanan Politik dan Sosial: Pemerintahan Jepang dibawah kepemimpinan Fumio Kishida melakukan reformasi terhadap pertahanan keamanan Jepang yang lebih agresif dan disesuaikan dengan kebijakan sebelumnya namun dalam hal ini melakukan perombakan yang jauh lebih besar.
4. Diplomatic Arrangement: Melalui *military buildup*, Jepang mulai mensurvive situasi yang dinilai bisa mengancam keamanan nasional secara tak terduga.

Security Dilemma

Pada dasarnya perilaku negara yang menunjukkan Offense-Defense juga tidak terlepas dari konsep *security dilemma* dimana negara dalam meningkatkan pertahanan dan keamanannya dinilai sebagai hal yang mampu melemahkan dan mengancam pertahanan dan keamanan negara lainnya. *Security dilemma* pada umumnya membahas terkait perang dan damai melalui interaksi yang tercipta antar negara. Melalui konsep ini, maka penyebab pecahnya perang dan perdamaian maka dapat dianalisis atau meringankan potensi *security dilemma*. Namun meski demikian, menurut Burhanuddin, antara perang dan damai sepenuhnya tidak dapat dianalisis secara terpisah. Terdapat berbagai hal yang melatarbelakangi terjadinya perang akan tetapi diantara beberapa analisis tersebut belum ada sepenuhnya solusi yang bisa digunakan sebagai pisau analisis mengatasi perang (Burhanuddin, 2017).

Menurut Herbert Butterfield (1951) dalam bukunya "*History and Human Relations*" bahwa *security dilemma* mendorong setiap negara untuk menciptakan adanya perang meskipun pada dasarnya diantara mereka tidak ada keinginan untuk saling menyakiti satu sama lainnya. Pernyataan tersebut didukung dengan proposisi *security dilemma* bahwa sumber utama terciptanya *security dilemma* adalah ketakutan akibat dosa umat manusia, diperlukannya kesan ketidakpastian terhadap niat dari pihak lain, tercipta atas ketidaksengajaan, akibat yang ditimbulkan selalu berakhir tragis, dipengaruhi oleh faktor psikologis dan penyebab mendasar atas berbagai konflik yang dilakukan oleh negara (Shipping, 2009).

Perspektif lain juga ditunjukkan oleh John Herz (1950) yang menyatakan bahwa *security dilemma* sebagai satu kesatuan kelompok dan individu yang hidup secara berdampingan tanpa adanya struktur yang terorganisir dan tidak terlalu memperdulikan apakah mereka akan diserang, didominasi atau dimusnahkan oleh kelompok dan individu lainnya. Hal tersebut dikarenakan negara yang merasa sepenuhnya aman di dunia dengan hidup beriringan dengan berbagai unit-unit untuk bersaing sama sekali tidak ada sehingga persaingan kekuasaan menjadi hal yang lumrah dan keamanan menjadi lingkaran setan yang terus berlanjut tanpa akhir begitupun dengan terjadinya akumulasi kekuasaan.

Herz menjabarkan terkait aspek yang mendorong terjadinya *security dilemma* dalam bukunya "*Political Realism and Political Idealism*" bahwa anarki merupakan sumber utama dari *security dilemma* karena kurangnya rasa persatuan, ketidakpastian dan ketakutan suatu negara terhadap niat antar negara sehingga setiap negara cenderung melakukan tindak kejahatan, perilaku negara untuk terlepas dan mementingkan diri dari *security dilemma* justru menimbulkan siklus baru berupa persaingan kekuasaan, negara yang mencoba untuk terlepas dari dari *security dilemma* tidak berdampak pada meningkatkan keamanan tapi justru merugikan, menjadi penyebab perang tapi hanya untuk beberapa jenis perang saja, dan bersifat *self-reinforcing* atau lingkaran setan (Herz, 1951).

Status quo antar negara menunjukkan *security dilemma* dimana negara cenderung mengeluarkan kebijakan untuk meningkatkan pertahanan dan keamanannya namun tindakan tersebut justru dinilai mampu menurunkan potensi keamanan negara lain. Dengan kata lain, jika dalam hubungan antar negara yang mendukung sepenuhnya situasi offense maka perang dan konflik tidak bisa terelakkan sehingga dominasi offense dinilai lebih unggul dibandingkan defense terlebih lagi setiap negara akan lebih memposisikan dirinya menyerang jika terjadi perang dan konflik jika dibandingkan mempertahankan dan membela diri. Selain itu, kekhawatiran lainnya yang timbul adalah rasa takut terhadap pengalihan kekuasaan dan pengambilalihan kawasan yang jauh lebih dominan oleh satu negara dalam kawasan (Bressler, Trager, & Dafoe, 2021).

Kondisi Asia Timur telah mengalami pergeseran besar, utamanya dalam hal keamanan negara. Setiap negara tidak lagi hanya berpacu untuk meningkatkan

hegemoninya di kawasan, akan tetapi lebih kepada untuk melindungi kedaulatan negara dari ancaman negara lain melalui pertahanan keamanan sebagai aspek yang utama. Jepang menganggap kebangkitan hegemoni Tiongkok sebagai tantangan besar berubah sebagai sebuah ancaman terhadap Jepang di Asia Timur, begitupun dengan Korea Utara dan Rusia sebagai target baru dalam *Japan's Transformational National Security Strategy 2022*. Dengan kata lain, Jepang merumuskan perubahan secara garis besar terhadap keamanan nasional yang lebih bisa disesuaikan dengan kondisi keamanan regional kawasan Asia Timur.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif melalui teknik pengumpulan data sekunder berupa pernyataan dan dokumen resmi pemerintahan Jepang, data resmi dari *Stockholm International Peace Research Institute* yang memuat informasi mengenai keamanan Jepang serta informasi tentang kondisi politik dan keamanan kawasan Asia Timur dalam bentuk *library research* dengan menggunakan literatur seperti dokumen resmi, artikel, jurnal hingga buku dan berita. Objek yang dikaji dalam penelitian ini berfokus pada *Japan's Transformation National Security Strategy 2022* sebagai kebijakan Jepang dalam menghadapi tantangan dan ancaman di kawasan Asia Timur, utamanya dalam merespon perang Rusia-Ukraina dan konflik di Selat Taiwan.

Penelitian ini menggunakan teori *Offense-Defense Balance* dan *Security Dilemma*. *Offense-Defense Balance* memberikan penjelasan secara general terkait sentimen interaksi antar negara yang mampu menciptakan situasi *security dilemma* dalam kawasan serta kebijakan negara terhadap perannya dalam strategi pertahanan. Teori tersebut akan dijadikan sebagai landasan untuk menjelaskan situasi keamanan kawasan yang mempengaruhi perumusan strategi keamanan nasional suatu negara sehingga tercipta mendorong setiap negara untuk memperkuat kapasitas keamanan dalam kawasan.

Berbagai penelitian dengan analisis topik pembahasan mengenai kebijakan pertahanan dan keamanan Jepang di kawasan Asia Timur telah banyak ditemukan

sebagai pembahasan umum dan topik yang penting untuk dikaji secara lebih mendalam. Salah satu diantaranya yakni penelitian oleh Rani Shabrina Anjarini (2018) dengan judul “Respons Jepang Terhadap Kompleksitas Kawasan Asia Timur Tahun 2013-2017” berfokus pada aksi-reaksi negara-negara di kawasan Asia Timur yang membentuk pola amity dan pola enmity yang kemudian direspons oleh Jepang dengan meningkatkan kapasitas strategi pertahanannya secara *Internal Transformation* yang meliputi *National Security Strategy*, *National Defense Program Guidelines*, kapabilitas militer dan reinterpretasi artikel 9 konstitusi 1947.

Penelitian lainnya dengan judul “Dampak Japan’s *New Security Bills* 2015 Terhadap Kebijakan Pertahanan dan Keamanan Jepang di Asia Timur” yang dikaji oleh Indah Kurniasari (2018) juga mengarah pada pembahasan yang sama namun lebih mengarahkan analisisnya pada kebijakan pertahanan Jepang yang terbentuk pada tahun 2015 sebagai hasil perumusan undang-undang terhadap pengembangan perundang-undangan perdamaian dan keamanan dan perundang-undangan dukungan perdamaian internasional ditengah dinamika keamanan Asia Timur. Kebijakan pertahanan dan keamanan Jepang dalam penelitian ini lebih merujuk pada *National Security Strategy* dan *National Defense Program Guidelines*.

Adapun persamaan yang bisa dilihat dari kedua *literatur review* diatas bahwa penelitian ini mencoba untuk menganalisis pertahanan Jepang sebagai negara yang memiliki pengaruh besar di Asia Timur dengan fokus penelitian berdasarkan pada kebijakan strategi pertahanan keamanan yang telah dibentuk baik secara internal maupun eksternal yang kemudian dihubungkan dengan sistem keamanan Asia Timur yang kompleksitas dengan berbagai realitas dan rivalitas negara di kawasan tersebut. Namun yang menjadi perbedaan dari penelitian ini yakni dari segi kebijakan yang baru mencakup tiga dokumen strategi nasional secara langsung yakni *National Security Strategy* (NSS), *National Defense Security* (NDS) dan *Nation Defense Buildup Program*. Kemudian dari segi negara target, dalam penelitian ini memfokuskan tiga negara yaitu China, Korea Utara dan Rusia.

Hasil dan Pembahasan

Japan’s Transformation National Security Strategy 2022

Pemerintahan Jepang pada 16 Desember 2022 melakukan perubahan besar terhadap sistem pertahanan dan keamanannya. Transformasi tersebut kembali dilakukan sejak terbentuknya National Security Strategy Jepang pada tahun 2013. Transformasi tersebut meliputi penerbitan tiga dokumen utama terkait perencanaan pertahanan dan keamanan nasional yang dikenal sebagai “*Three Security Documents*” yang terdiri atas *National Security Strategy* (NSS), *National Defense Security* (NDS) dan *Defense Buildup Program* (DBP). Transformasi tersebut merupakan bentuk respon dari Jepang terhadap tantangan geopolitik di sekitaran territorial Jepang yang mencakup ketegangan antara Tiongkok -Taiwan, program rudal nuklir dan balistik Korea Utara sebagai tantangan berkelanjutan dan invasi besar Rusia terhadap Ukraina di tahun 2021 (Tokuchi, 2023, p. 6).

Dalam hal ini, NSS 2022 merupakan revisi versi terbaru dari *National Security Strategy* 2013 yang merupakan pedoman utama pertahanan keamanan Jepang. Kemudian, NDS merupakan versi terbaru dari *National Defence Programs Guidelines* 2018 dan *Mid-term Defence Plan* 2018 (Tokuchi, 2023, p. 6). Sedangkan NDBP merupakan realisasi program pertahanan jangka untuk mencapai tujuan sebagaimana yang telah dibentuk sebelumnya dalam NDS. Nyatanya, PM Fumio Kishida telah terlebih dahulu melakukan peninjauan perubahan terhadap sistem pertahanan dan keamanan Jepang 2013 sejak bulan Oktober 2021 sebelum pemilihan umum dilaksanakan di Jepang (Tokuchi, 2023, p. 6). Sehingga hasil akhirnya dilakukannya transformasi *Three Security Documents* pada Desember 2022. Transformasi terhadap *National Security Strategy* 2022 memberikan perubahan yang sangat mendasar terhadap *National Security Strategy* 2013 utamanya sebagai tanggapan Jepang dalam menghadapi situasi keamanan regional di Asia Timur dan Asia Pasifik. Hal yang paling berubah dalam NSS 2022 yakni pemerintah Jepang menyoroti sikap antisipasi keamanan terhadap tiga negara yang diyakini mampu memberikan ancaman terhadap lingkungan keamanan regional. Adapun ketiga negara yang dimaksudkan dalam NSS 2022 tersebut yakni Tiongkok, Korea Utara dan Rusia. Dalam NSS 2022, potensi ancaman Tiongkok dinilai sebagai “*Unprecedented and the greatest strategic challenge*”, Korea Utara ditinjau dari segi aktivitas militer yang lebih mengkhawatirkan dan secara bertahap akan menjadi ancaman terhadap keamanan nasional Jepang.

Sedangkan Rusia yang sebelumnya tidak dianggap sebagai ancaman dan merupakan negara mitra keamanan Jepang justru menjadi negara dengan tingkat ancaman yang mengkhawatirkan akibat tindakan invasi Rusia ke Ukraina sejak perang tahun 2021. Alasan mendasarnya bahwa berdasarkan survei pemerintah Jepang menyatakan 77% kekhawatiran invasi Rusia ke Ukraina dapat mempengaruhi situasi berbahaya yang melibatkan Taiwan dan 79% keamanan nasional Jepang terancam oleh invasi Rusia ke Ukraina dan menurut *the Japanese Foreign Ministry* bahwa 88% keamanan Asia Timur semakin terancam (Tokuchi, 2023, p. 7).

Transformasi *National Defense Security* 2022 diperbarui bukan sekedar mengenai prinsip dan kebijakan mendasar pertahanan dan keamanan Jepang tetapi terkait pelaksanaan inisiatif yang telah ada dan tercantum dalam dokumen strategis yang ada. Untuk bisa mengatasi ancaman tersebut, dalam NSS 2022 telah menetapkan lima kemampuan yang dikembangkan yakni kemampuan diplomasi, militer, ekonomi, intelijen dan teknologi. Keseluruhan kemampuan tersebut kemudian ditetapkan sebagai elemen utama "*Comprehensive National Power*" dan menyelaraskannya sebagai komitmen untuk kekuatan secara integral (Tokuchi, 2023).

Selain kemampuan kapabilitas tersebut, Jepang juga masih tetap berfokus dengan tiga pilar dasar kebijakan keamanan nasionalnya yakni untuk memperkuat arsitektur pertahanan nasional Jepang, Memperkuat kemampuan pencegahan dan respons bersama antara aliansi Jepang – Amerika Serikat, dan memperkuat kolaborasi dengan berbagai negara yang memiliki pola pikir sama sesuai NSS 2022 Jepang (Tokuchi, 2023, p. 8). Kemudian untuk konstruksi pembangunan pertahanan, dalam NDS 2022 merumusan strategi Jepang untuk 5-10 tahun kedepan. Prinsip perubahan terkait besaran anggaran militer Jepang telah dijabarkan dalam NSS 2022 "*In FY 2027, ... Japan will take the necessary measures to make the level of its budget, for both fundamental reinforcement of defence capabilities and complementary initiatives, reach 2% of current GDP, by building on the content of necessary defence capabilities, and by taking into account indexes of international comparison, with a view to coordination with its ally, like-minded countries and others*". (Tokuchi, 2023, p. 9).

Dalam hal ini, Jepang melipatgandakan anggaran dan pembelanjaan pertahanan Jepang untuk tahun 2027 kedepan yang ditentukan oleh DBP. Jumlah total anggaran yang digelontarkan mencapai sekitar 43 Triliun Yen atau sebesar \$330 Miliar. Besaran

anggaran pertahanan Jepang meningkat hingga sebesar 27,4% sedangkan untuk bidang lainnya mencapai 1,7% jaminan sosial, 0,5% pendidikan dan ilmu pengetahuan serta 0,2 kerjasama ekonomi. Secara substansial, pengeluaran untuk masalah pemeliharaan dan perbaikan lebih besar dibandingkan tahun 2022 yakni anggaran amunisi meningkatkan 3,3 kali lipat termasuk fasilitas, ketahanan dan keberlanjutan kekuatan pertahanan operasional dan sebesar 3,1 kali untuk kemampuan pertahanan secara umum dan pertahanan serangan rudal (Tokuchi, 2023, p. 9-10). Jika berdasarkan pada rencana tahun 2027, maka Jepang akan termasuk sebagai negara ketiga dengan anggaran terbesar di dunia (Weinstein & Kita, 2023, p. 1).

Transformasi *Defense Buildup Program* 2022 berfokus untuk merealisasikan rancangan strategis terhadap pertahanan dan keamanan Jepang dalam jangka waktu 5 - 10 tahun sesuai yang dimaksudkan dalam NDS 2022. Dalam hal ini meliputi Kemampuan Pertahanan *Stand Off*, Kemampuan Pertahanan Udara dan Rudal Integrasi, Kemampuan Pertahanan Tak Berawak, Kemampuan Operasi Lintas Domain, Komando dan Kendali Fungsi Intelijen, Penyebaran Seluler Perlindungan Sipil, Keberlanjutan dan Ketahanan, Produksi Pertahanan dan Basis Teknologi serta Basis Sumber Daya Manusia (DBP, 2022).

Isi dari DBP 2022 juga memperkenalkan strategi keamanan nasional terbaru "kemampuan serangan balasan". Kemampuan tersebut diperlukan sebagai respons atas kemajuan yang drastis dalam teknologi yang berkaitan dengan kemampuan rudal di negara sekitaran territorial Jepang. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi hal tersebut, maka Jepang membutuhkan kemampuan *offense* untuk menyempurnakan benteng pertahanan misilnya yang secara eksklusif berorientasi kepada pertahanan Jepang. Keputusan mengembangkan kemampuan serangan balasan sama sekali tidak bertentangan dengan pemerintahan Jepang bahkan sebagian besar masyarakat memberikan dukungan besar terhadap kemampuan tersebut. Menurut survei sebanyak 60% masyarakat mendukung dan 31% menentangnya.

Kerjasama Jepang-Amerika Serikat juga menjadi pembahasan lain dalam DBP 2022. Penguatan kemampuan gabungan Jepang-Amerika Serikat meliputi penguatan di bidang pertahanan serta penerapan langkah stabil dalam mendukung penempatan pasukan Amerika Serikat di Jepang. Selain kerjasama aliansi Jepang-Amerika Serikat,

nyatanya perhatian Jepang dalam NSS 2022 juga meliputi kolaborasi dengan negara yang sepemikiran melalui pelatihan bilateral/multilateral, kerjasama peralatan dan teknologi serta bantuan peningkatan kapasitas (DBP, 2022).

Respon Tiongkok terhadap *Japan's Transformation National Security Strategy 2022* di Asia Timur

Hubungan antara Tiongkok dan Jepang memberikan dua sisi yang berpengaruh positif terhadap keuntungan kedua negara namun juga berdampak negatif yang berpeluang besar meningkatkan potensi kekhawatiran hingga ancaman bagi territorial kedua negara tersebut. Hubungan yang dibentuk oleh Tiongkok dan Jepang meliputi hampir keseluruhan bidang secara umum seperti bidang politik, sosial budaya, ekonomi, dan pertahanan keamanan. Konteks hubungan antara Tiongkok dan Jepang tentunya juga tidak terlepas dari berbagai dinamika sehingga kedua negara seringkali terlibat dalam berbagai konflik seperti isu perdagangan, perebutan teritorial, perluasan kekuasaan melalui sengketa pulau, konflik Taiwan hingga peningkatan kapabilitas militer dan alutsista.

Jika berdasar pada NSS 2013, Korea Utara dinilai sebagai negara yang memiliki potensi ancaman yang jauh lebih besar dibandingkan Tiongkok sebagai “Masalah yang memprihatinkan”. Namun dalam NSS 2022, potensi ancaman Tiongkok justru lebih besar dibandingkan Korea Utara dan dianggap sebagai “*Unprecedented and the greatest strategic challenge*”. NSS 2022 menyoroti tindakan Tiongkok dalam meningkatkan belanja pertahanan ke tingkat ekstensif untuk kekuatan militer, termasuk rudal dan nuklir, mengubah kondisi wilayah maritim dengan kekerasan termasuk di Laut China Timur dan Selatan dan sekitar Pulau Senkaku, memperluas dan mengintensifkan aktivitas militernya yang dinilai berpotensi mempengaruhi keamanan nasional laut Jepang, Tiongkok juga semakin aktif menggunakan kekuatan militernya di sekitaran wilayah perairan dan udara Taiwan termasuk dengan peluncuran rudal balistik di sekitar perairan Jepang (NSS, 2022).

Pernyataan Jepang terhadap kebijakan pertahanan yang baru direspons kecam oleh Tiongkok sebagai sebuah provokasi baru terhadap Tiongkok dan persepsi yang salah terkait kemiliteran Tiongkok. Bagi Tiongkok, tindakan Jepang dalam meningkatkan anggaran pertahanannya dengan perhatian yang berfokus pada sikap

eksternal dan aktivitas militer Tiongkok merupakan bentuk sikap ofensif Jepang untuk meningkatkan persaingan alutsista di kawasan (Ryall, 2023). Latihan militer bersama Rusia, menurut Tiongkok merupakan bentuk kerja sama pertahanan di ranah non-blok yang sama sekali tidak memicu adanya konfrontasi, tidak menargetkan negara manapun dan sebagai bentuk komitmen menjaga kestabilan kawasan dan perdamaian. Sedangkan untuk permasalahan konflik Tiongkok-Taiwan merupakan isu internal dimana Jepang sama sekali tidak perlu untuk terlibat lebih dalam (CNN Indonesia, 2023).

Selain itu, Tiongkok mulai mengisyaratkan rencana balasan secara militer dan jika hal tersebut berkaitan dengan Taiwan, kemiliteran Tiongkok akan sepenuhnya mengadakan latihan dan patroli lebih sering di sekitar perairan internasional, termasuk wilayah udara Jepang. Tiongkok juga bersiteguh untuk terus menerus membangun benteng pertahanan di sekitar pulau yang dipersengketakan utamanya di Kepulauan Senkaku/Diaoyu meskipun dinilai bertentangan. Berkaitan konflik Taiwan, ambisi militer Tiongkok menyatakan akan menguasai dan mengintegrasikan Taiwan secara paksa bergabung dengan daratan Tiongkok meski harus terlibat sengketa teritorial negara lainnya seperti Jepang dan Korea Selatan (Ryall, 2022).

Dengan kata lain, tindakan Tiongkok untuk merespon Jepang dengan berfokus pada peningkatan kemiliteran dengan melihat kondisi dinamika lingkungan strategis. Pertama, Tiongkok yang menilai keamanan baru Jepang yang lebih bersifat *offense* dan berpotensi menimbulkan ketidakstabilan keamanan, maka dengan melakukan peningkatan kapasitas militer di kawasan dengan porsi yang jauh lebih besar akan bisa membendung tingkat ancaman yang kemungkinan besar diakibatkan oleh persinggungan dan perlombaan senjata dan alutsista di regional. Kedua, peningkatan anggaran militer Tiongkok lebih menasar kepada kawasan yang dinilai strategis oleh kedua belah pihak seperti Kepulauan Senkaku/Diaoyu dan pulau lainnya di sekitar Laut China Selatan dan Timur. Ketiga, aktivitas militer Tiongkok yang lebih intensif untuk memancing pengalokasian Taiwan dengan Tiongkok secepatnya.

Pada dasarnya, perubahan terhadap kebijakan pertahanan dan keamanan Tiongkok dilatarbelakangi oleh perubahan Strategi Nasional 2049 yang berfokus memperluas modernitas politik, sosial dan kemiliteran kekuatan nasional,

penyempurnaan tata kelola, dan dukungan terhadap kepentingan dan sistem nasional dengan merevisi tatanan internasional. Tiongkok mengupayakan menciptakan kekuatan nasional besar dengan berdasarkan kepada pertahanan untuk kedaulatan, keamanan dan pembangunan. Dengan berdasarkan pada Strategi Nasional 2049, maka arah perkembangan militer dan keamanan Tiongkok sepenuhnya memetakan kepada arah strategi nasional, ekonomi dan militer Tiongkok serta meningkatkan kemampuan dan kapasitas *People's Liberation Army's* (PLA) untuk penyempurnaan modernisasi di masa depan (U.S Department of Defense, 2023, p. 47-48).

Penyempurnaan modernisasi *People's Liberation Army's* (PLA) kemudian sejalan dengan efektivitas pertahanan nasional dan kemiliteran Tiongkok. Berdasarkan hasil sidang tahunan Kongres Rakyat China (NPC) 2022, anggaran militer Tiongkok meningkat sebesar 7,2% dibandingkan sebelumnya sebesar 7,1%. Kebijakan Tiongkok dalam meningkatkan anggaran kemiliterannya merupakan bentuk partisipasi pemerintah dalam pemenuhan modernisasi pertahanan nasional berskala luas meliputi keamanan kedaulatan dan keutuhan negara. Tujuan kebijakan tersebut berorientasi terhadap pengamanan kedaulatan, kepentingan pembangunan dan keamanan yang didasarkan pada strategi militer Tiongkok "Pertahanan Aktif". PLA sebagai instrumen pertahanan di modernisasi dengan memperluas kepentingan global dan kebijakan luar negeri (Hidayat, 2023).

Selain peningkatan kapasitas militer, Tiongkok juga mulai memperluas penelitian, pengembangan serta jangkauan hulu ledak nuklir yang bertujuan untuk menguji kapasitas sekaligus mendorong ukuran dan perluasan laju persediaan nuklir. Tiongkok secara terus menerus melakukan modernisasi dengan memverifikasi perluasan secara signifikan untuk kekuatan nuklir jika dibandingkan sebelumnya. Pada tahun 2022, Beijing meneruskan ekspansi nuklirnya dan berdasarkan Departemen Pertahanan memperkirakan penambahan cadangan nuklir dengan 500 hulu ledak yang akan beroperasi pada 2023 dan lebih dari 1.000 hulu ledak di tahun 2030 namun pengerahan kekuatan dan kesiapan peningkatan kekuatan hingga tahun 2035 yang nantinya sejalan dengan perwujudan militer mendunia tahun 2049 (U.S Department of Defense, 2023, p. 104).

Aktivitas kemiliteran oleh PLA memuat beberapa kepentingan dari Tiongkok yakni untuk menormalisasikan latihan kemiliteran skala besar oleh PLA yang dikenal

dengan “*Joint Sword*” secara berkelanjutan. Patroli latihan bersama yang dilakukan oleh Angkatan Udara PLA bahkan melintasi hingga garis Tengah Selat Taiwan sejak Juni 2023. Dalam hal ini, Tiongkok akan melakukan pengiriman kapal penjaga Pantai dengan tujuan menginspeksi kapal asing diperairan Taiwan selama latihan berlangsung, mengantisipasi situasi darurat, dan pengembangan kemungkinan dan aktivitas blockade di Taiwan. Sedangkan untuk aktivitas latihan militer udara, Tiongkok mengepung Taiwan dengan drone selama patroli Angkatan Udara PLA dengan menggunakan pesawat tempur, tanker bahan bakar udara, pembom, dan pesawat peringatan dini (Yasuyuki, 2023).

Dalam NSS 2022 tersebut, Jepang meningkatkan kapasitas kemampuan SDF dengan strategi “Serangan Balik” untuk mengantisipasi tindakan Tiongkok di kawasan serta ancaman nuklir dan rudal Korea Utara. Kebijakan pertahanan tersebut tetaplah berorientasi dengan konstitusi melalui pemenuhan tiga syarat penggunaan kekuatan yang termuat dalam the 2015 Legislation for Peace and Security. Kemudian untuk penempatan strategi serangan balik tersebut difokuskan pada Kepulauan Barat Daya yang merupakan gugusan pulau yang terhubung dengan Taiwan melalui Pulau Kyushu yang dilengkapi dengan ketahanan keberlanjutan dan menempatkan beberapa amunisi, material dan bahan bakar. Oleh karena itu, jika konflik terjadi di kawasan ini, Jepang akan merespon dengan tiga pola umum yang berbeda.

Pertama, konflik militer langsung yang melibatkan Jepang dan Tiongkok terhadap Kepulauan Senkaku/Diaoyu atau invasi Tiongkok terhadap Taiwan dengan melibatkan serangan ke wilayah Jepang. Dalam hal ini, Jepang akan melakukan serangan balik namun dalam bentuk *Self-Defense*. Kedua, Invasi Tiongkok kepada Taiwan tetapi tidak melibatkan serangan terhadap Jepang. Dalam hal ini, Jepang akan menganggapnya sebagai situasi krisis dan menggunakan hak pertahanan diri secara kolektif untuk melakukan kekerasan. Ketiga, Invasi Tiongkok kepada Taiwan tetapi tidak melibatkan serangan terhadap wilayah Jepang dan mengidentifikasikan sebagai situasi pengaruh kritis sehingga SDF diizinkan untuk memberikan dukungan logistik kepada Amerika Serikat tanpa adanya kekerasan (Fukuda, 2023).

Respon Korea Utara terhadap *Japan's Transformation National Security Strategy* 2022 di Asia Timur

Sebagai negara besar dengan pengaruh yang luas di Asia Timur, nyatanya tidak sepenuhnya memberikan hubungan yang baik antara Jepang dan Korea Utara. Kedua negara memiliki sejarah panjang dan saling berkaitan sebagai negara bersaing di Asia Timur, utamanya di bidang pertahanan dan keamanan. Hubungan Jepang dan Korea Utara di bidang pertahanan selalu menimbulkan konflik yang memicu potensi terjadinya ancaman berkelanjutan. Baik Jepang maupun Korea Utara tidak terlepas dari aksi-reaksi perlombaan kapabilitas militer dan alutsista sehingga konsentrasi keamanan regional Asia Timur semakin meningkatkan di setiap periode.

Dalam NSS 2022, Korea Utara berulang kali melakukan peluncuran rudal balistik dengan jumlah dan cakupan yang tidak pernah diduga sebelumnya sehingga kemampuan Korea Utara semakin meningkat yang ditunjukkan dengan kemampuan pesat teknologi dan operasional terkait peluncuran rudal balistik jenis ICBM, bahkan bermaksud meningkatkan kemampuan rudal balistiknya pada tingkat kuantitas dan kualitas dengan kecepatan maksimum. Akibatnya aktivitas militer Korea Utara kali ini justru menimbulkan ancaman yang jauh lebih besar dan berbahaya terhadap keamanan nasional Jepang. Selain kemampuan rudal dan kemiliteran, stigma dan isu penculikan warga negara yang oleh Korea Utara menjadi isu kritis terhadap kedaulatan Jepang yang berakibat besar terhadap nyawa, kehidupan dan keselamatan warga negara Jepang sehingga hal ini perlu diselesaikan oleh pemerintah dan dinilai sebagai bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (NSS, 2022).

Pernyataan yang disampaikan oleh Jepang terkait perubahan pertahanan baru yang semakin diperkuat dikecam keras oleh Korea Utara dengan mengkritik keputusan Jepang dalam meningkatkan anggaran pertahanan beserta kemungkinan besar berpotensi akan adanya serangan militer. Korea Utara merespon Jepang melalui Kementerian Luar Negerinya dengan menyatakan penggunaan aspek kemiliteran secara tegas untuk integritas kewilayahan, pertahanan kedaulatan nasional, serta kepentingan fundamental. Korea Utara menyatakan dengan tegas kepemilikan hak untuk tidak segan-segan mengambil langkah militer mengingat tingkat kerumitan yang tinggi terkait keamanan regional di Asia Timur yang disebabkan oleh Jepang.

Korea Utara akan sepenuhnya secara berkala meningkatkan kemampuan senjata nuklir dan program rudalnya sebagai bentuk pertahanan atas kedaulatan negaranya.

Nyatanya pada tahun 2023, Korea Utara meningkatkan anggaran pertahanannya yang sebagian besar dikerahkan untuk menguji dan memprogramkan nuklir dan rudal. Berdasarkan Korea *Central News Agency* (KCNA), Majelis Rakyat Tinggi Korea Utara (*Supreme People's Assembly*/SPA) telah mengesahkan laporan realisasi APBN 2022 dan RAPBN 2023 terkait peningkatan belanja negara yang sebesar 1,7% pada tahun ini dan sebesar 15,9% untuk mendorong program nuklir yang lebih luas dan agresif untuk mencegah terjadinya perang baik secara langsung atau tidak serta menjaga keamanan dan martabat negara Korea Utara (Jamil, 2023).

Selain program pengembangan nuklir, Korea Utara juga memfokuskan keamanannya terhadap rudal balistik berdasarkan pengesahan anggaran tersebut. Uji coba rudal yang dilakukan Korea Utara akan semakin intensif yang meliputi eksponensial peningkatan hulu ledak, memproduksi secara massal “nuklir taktis” dan pengembangan rudal *Intercontinental Ballistic Missile* (ICBM). Peningkatan anggaran pertahanan hingga kemampuan parade militer mendeskripsikan bahwa Korea Utara secara terus menerus membangun pertahanannya dengan penggunaan nuklir. Pengembangan nuklir yang diintensifkan oleh Korea Utara meliputi peningkatan rudal baru untuk bisa mengirimkan senjata nuklir skala besar serta jangkauan yang bisa mencapai Amerika Serikat. Selain itu juga, memproduksi rudal dengan jarak pendek untuk mengirim hulu ledak taktis serta penciptaan rudal jelajah dengan bersenjata nuklir untuk pertama kalinya (Johnson, 2023).

Dalam hal ini, Korea Utara sama sekali tidak akan ragu untuk melancarkan serangan nuklirnya kepada negara lain yang memprovokasi serangan senjata. Hal tersebut dikarenakan program nuklir dan rudal Korea Utara ditujukan untuk self-defense dalam menghadapi kebijakan yang dibuat oleh Jepang, Amerika Serikat, dan Korea Selatan. Kekuatan nuklir Korea Utara bisa mencegah perang sekaligus berpotensi menyerang negara lain yang dinilai melanggar kepentingan fundamental Korea Utara. Hal tersebut didasarkan pada Undang-Undang baru tahun 2022 yang menetapkan hak penggunaan serangan nuklir untuk melindungi diri dan keseluruhan kekuasaan yang menentukan adalah senjata nuklir. Tetapi, jika sistem kontrol dan komando terancam, maka secara otomatis rudal akan diluncurkan (Aulia & Mada, 2023).

Undang-Undang tersebut juga menjelaskan pelarangan pembagian senjata dan teknologi nuklir terhadap negara lain untuk menurunkan bahaya adanya perang nuklir. Sedangkan hal yang bisa memicu serangan nuklir adalah apabila pemimpin, masyarakat dan keberadaan negara merasa terancam, seperti penempatan kapal induk, kapal selam dan pesawat pengebom Amerika Serikat. Selanjutnya pada tahun 2023, Korea Utara mengadopsi amandemen konstitusi mengenai kebijakan nuklir yakni mempercepat produksi senjata nuklir yang lebih kompeten untuk mencegah provokasi Amerika Serikat bahkan Korea Utara sebelumnya juga pernah mengancam menenggelamkan Jepang ke dasar laut dengan menggunakan senjata nuklir (Jamil, 2023).

Sejak parlemen mengesahkan anggaran pertahanan tahun 2023, Korea Utara telah meluncurkan setidaknya 25 rudal termasuk diantaranya ICBM dan tercatat sebagai jumlah peluncuran terbanyak kedua dibandingkan tahun 2022 sebanyak 59 peluncuran rudal. Sedangkan Kementerian Pertahanan Korea Utara meyakini telah menembakkan ICBM bahan bakar pada sebanyak tiga kali sejak tahun 2023 karena mampu meluncur secara cepat dibandingkan ICBM berbahan bakar cair. Program ini pada dasarnya telah diumumkan sejak tahun 2021 yang mencakup ICBM bahan bakar padat, senjata nuklir versi ringan dan kecil dan operasi satelit mata-mata militer (Aljazera, 2023).

Respon Rusia terhadap *Japan's Transformation National Security Strategy 2022* di Asia Timur

Sebagai negara eksternal diluar kawasan Asia Timur, Rusia nyatanya memiliki pengaruh dan hegemoni cukup besar di Asia Timur untuk beberapa dekade terakhir ini. Perang Rusia - Ukraina di tahun 2021 mulai memancing perhatian keseluruhan negara, tidak terkecuali bagi negara besar di Asia Timur. Kehadiran Rusia sebagai pemain eksternal baru di Asia Timur mulai membentuk berbagai stigma positif dan negatif terhadap negara tertentu. Hubungan yang dimunculkan oleh Tiongkok -Rusia pada dekade terakhir ini lebih dinilai sebagai sebuah kecaman terhadap teritorial dan keamanan nasional Jepang. Baik Jepang maupun Rusia seringkali terlibat dalam berbagai konflik yang hingga saat ini belum sepenuhnya menemukan penyelesaian. Akan tetapi, meski terlibat dalam konflik yang sama, baik Jepang ataupun Rusia

pernah menjalin kerjasama yang baik di bidang ekonomi dan pertahanan di era pemerintahan Shinzo Abe.

Melalui NSS 2022, Jepang menargetkan Rusia sebagai negara yang bisa menimbulkan ancaman terhadap Jepang. Penargetan Jepang terhadap Rusia merupakan bentuk perubahan mendasar karena sebelumnya dalam NSS 2013, Rusia menjadi mitra strategis bagi Jepang dan bekerjasama dalam menjaga keseimbangan Asia Pasifik dari. Namun dalam NSS 2022, menyatakan agresi militer Rusia kepada Ukraina menjadikan tindakan Rusia berbahaya bagi negara lain karena tidak akan ragu untuk mempergunakan kemampuan militer guna mencapai kepentingan keamanan nasional. Bahkan Rusia senantiasa melakukan tindakan berulang sebagai ancaman penggunaan senjata nuklir. Kemudian dalam hal kemiliteran, Rusia mulai mempercepat pengembangan aktivitas militernya dengan persenjataan di wilayah utara yang berbatasan langsung dengan Jepang. (NSS, 2022).

Pertahanan Jepang terbaru turut memancing reaksi dari Rusia sebagai salah satu negara yang berpotensi memberikan ancaman terhadap pertahanan dan kedaulatan Jepang. Melalui Kementerian Luar Negeri, Rusia menyebut kebijakan pertahanan baru Jepang tentunya akan memicu meningkatnya tantangan keamanan serta menyebabkan ketegangan di regional, utamanya kawasan Asia Pasifik. Permasalahan lainnya juga turut memancing kecaman tegas Rusia terhadap Jepang terkait rencana Kementerian Pertahanan Jepang untuk mengerahkan kemiliteran berupa rudal supersonik di Pulau Hokkaido yang berada dekat dengan Kepulauan Kuril. Hal tersebut menjadi ancaman bagi Rusia karena lokasi yang dimaksud berdekatan dengan pulau di wilayah timur Rusia sebagai kawasan strategis militer Rusia (CNBC, 2023).

Menanggapi hal tersebut, Rusia memberikan berbagai tindakan khusus yang disesuaikan dengan kesan ancaman yang diterimanya. Terkait dengan kebijakan Jepang, Rusia kemungkinan besar merespon Jepang dengan melalui latihan militer bersama dengan Tiongkok, juga termasuk navigasi angkatan laut dan penerbangan bersama pesawat pengebom di sekitaran wilayah udara Jepang sebagai tindakan nyata untuk saat ini. Gabungan latihan militer bersama Rusia dan Tiongkok yang dimulai pada tahun 2022 tentunya memicu berbagai reaksi dari beberapa negara,

utamanya Jepang yang dinilai mengancam teritorial wilayahnya di Laut Jepang. Hubungan antara Rusia dan Tiongkok di bidang militer dan pertahanan berkembang signifikan mulai dari pembelian hingga pengiriman senjata oleh Rusia dan Tiongkok bahkan latihan militer bersama (Hart, 2023).

Latihan militer bersama antara Rusia dan Tiongkok di tahun 2023 bukanlah hal yang baru karena kedua negara tersebut, secara keseluruhan telah melakukan sebanyak 78 latihan militer bersama sejak tahun 2003- 2022. baik Rusia maupun Tiongkok menilai latihan militer gabungan sebagai bentuk deklarasi kemitraan tanpa batas dengan merujuk pada kerja sama militer yang bertujuan melawan Amerika Serikat beserta sekutunya di kawasan dengan maksud ketidaksukaan Rusia- Tiongkok terhadap kerja sama Jepang dan Amerika Serikat. Bagi Rusia, merupakan bentuk unjuk kapasitasnya yang bisa mengelola konflik di front Timur dan kemampuan pengawasan di Indo-Pasifik. Hal tersebut dikarenakan jalur perairan sekitaran laut Jepang merupakan jalur strategis bagi Rusia dan Tiongkok dalam mencapai kawasan Pasifik Barat Daya (France, 2023).

Pasca transformasi pertahanan yang baru, Jepang dan Amerika Serikat melakukan latihan militer tempur dan pendaratan di dekat pegunungan Fuji sebagai bentuk realisasi kerja sama militer ditengah peningkatan aktivitas militer Tiongkok dan Rusia. Namun jauh sebelum itu, Kementerian Pertahanan Jepang telah merencanakan penempatan dan mengerahkan kemiliterannya berupa rudal supersonik di Kepulauan Hokkaido hingga Kepulauan Kuril yang sedang dipersengketakan. Bagi Rusia, tindakan tersebut merupakan aktivitas ilegal di Kepulauan Kuril yang menjadi bagian dari wilayah timur Rusia sekaligus secara tidak langsung juga mengancam keamanannya (The Asashi Shimbun, 2022).

Oleh karena itu, Rusia mulai melakukan sejumlah tindakan signifikan untuk menjaga keamanan di Kepulauan Kuril dengan melakukan latihan angkatan laut skala besar yang melintasi Selat diantara Hokkaido dan Sakhalin dan Selat Tsugaru di pulau utama Hokkaido. Selain itu, Rusia juga menembakan sejumlah rudal darat di Kepulauan Kuril, utamanya peningkatan latihan angkatan laut di sekitaran wilayah Okhotsk. Beberapa peralatan juga diletakan sebagai senjata untuk Angkatan Bersenjata Rusia di wilayah Timur sekitar 400 alat militer modern, termasuk di

dalamnya jet Su-57 dan sistem rudal anti pesawat untuk satu tahun sehingga kemampuan militer di distrik tersebut meningkatkan (The Asashi Shimbun, 2022).

Kesimpulan

Japan's Transformation National Security Strategy 2022 sebagai bentuk kebijakan pertahanan dan keamanan terbaru Jepang yang meliputi penerbitan "*Three Security Documents*" sebagai bentuk respon Jepang terhadap ketidakstabilan keamanan di kawasan berupa persaingan alutsista militer, konflik di Selat Taiwan, dan Perang Rusia-Ukraina memicu berbagai tanggapan. Sebagai bentuk respon, China akan sepenuhnya mengadakan latihan dan patroli lebih sering di sekitar perairan internasional, terus menerus membangun benteng pertahanan di sekitar Kepulauan Senkaku/Diaoyu dan ambisi militer China mengintegrasikan Taiwan dengan daratan.

Korea Utara yang menilai keputusan Jepang menimbulkan krisis keamanan di kawasan dan semenanjung Korea. Korea Utara memberikan ancaman akan menyerang Jepang dengan kemampuan nuklir dan rudal ICBM sedang diprogramkan di sekitaran Laut Jepang jika berpotensi menyinggung kedaulatan fundamentalnya. Sedangkan Rusia, lebih berfokus untuk meningkatkan kerja sama militer dengan China yang meliputi latihan militer dalam skala luas. Terkait dengan persengketaan Kepulauan Kuril, Rusia melakukan pembatasan terhadap ancaman keamanannya dengan menempatkan kemiliteranya untuk menghalau tindakan Jepang.

Daftar Pustaka

- Alghifari, F., & Letticia, R. N. (2016). Analisis Teori Offense-Defense pada reformasi Kebijakan Pertahanan Jepang dalam Dinamika Keamanan di Asia Timur. *Global Jurnl Politik Internasional*, 18 (1), 18-33.
- Aulia, Luki & Kris Mada. (2023). Korut Tetapkan Syarat Penggunaan Nuklir, Korsel Tetap Tidak Mau Punya Bom Nuklir. *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/baca/internasional/2023/12/21/korut-tetapkan-syarat-penggunaan-nuklir-korsel-tidak-mau-punya-bom-nuklir>
- Burhanuddin, A. (2017). *Studi Keamanan dan Isu-Isu Strategis Global*. Makassar: Lembaga Kajian dan Pengembangan Pendidikan Universitas Hasanuddin.

- Butterfield, Herbert (1951) *History and Human Relations*, New York: Macmillan
- Bressler, R. D., Trager, R. F., & Dafoe, A. (2021). The Offense-Defense Balance and the Costs of Anarchy: When Improves Under Offensive Advantage. *Columbia.edu*, 2(1), 1-69.
- CNN Indonesia. (2023). China soal Jepang Anggap Beijing Ancaman: Tokyo Lebay. CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20230731163258-113-980052/china-soal-jepang-anggap-beijing-ancaman-tokyo-lebay>.
- CNBC Indonesia. (2023). Rusia Sebut Jepang Ancaman Baru, Ada Apa? CNBC Indonesia, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230104062350-4-402563/rusia-sebut-jepang-ancaman-baru-ada-apa>
- France, Agence. (2023). Russia, China End Military Exercises in Sea of Japan. Voanews, <https://www-voanews-com.translate.goog/amp/russia-china-end-military-exercises-in-sea-of-japan/>
- Fukuda, Madoka. (2023. February 17). Heightened Sense of Crisis: China & Taiwan in Japan's New National Security Strategy. Stimson, <https://www-stimson-org.translate.goog/2023/heightened-sense-of-crisis-china-and-taiwan-in-japans-new-national-security-strategy/>
- Gunawan, Sarah Meiliana. (2023). Transformasi Strategi Keamanan Nasional Jepang Lebih Berani dan Agresif. *dunia.rmol.id*, <https://dunia.rmol.id/read/2023/01/11/560010/transformasi-strategi-keamanan-nasional-jepang-lebih-berani-dan-agresif>
- Hart, Brian dkk. (2023). How Deep Are China-Russia Military Ties?. *China Power*, <https://chinapower-csis-org.translate.goog/china-russia-military-cooperation-arms-sales-exercises/>
- Herz, J. H. (1951). *Political Realisme and Political Idealism*. Chicago: University of Chicago Press.
- Hidayat, Mohammad Arief. (2023). China Umumkan Anggaran Pertahanan 2023 Sebesar Rp3,4 kuadriliun. *VIVA.co.id* <https://www.viva.co.id/berita/dunia/1580757-china-umumkan-anggaran-pertahanan-2023-sebesar-rp3-4-kuadriliun>
- Jamil, Ahmad Islamy. (2023). Korea Utara Pertahankan Alokasi Anggaran Militer 15,9 Persen dari APBN. *INewsId*, <https://www-inews-id.cdn.ampproject.org/v/s/www.inews.id/amp/news/internasional/korea-utara-pertahankan-alokasi-anggaran-militer-159-persen-dari-apbn>
- Jazeera Team, (2023). North Korea resumes missile launches in 'threat to peace and stability. *Aljazeera*, <https://www.aljazeera.com/news/2023/12/17/south-korea-says-north-fired-short-range-ballistic-missile-into-sea>

- Johnson, Jesse. (2022). North Korea launches long-range ballistic missile for fifth time in 2023. The Japan Times, <https://www.japantimes.co.jp/news/2023/12/18/asiapacific/politics/north-korea-missile-december-17/>
- Koshino, Yuka. (2022). Japan's transformational national-security documents. International Institute for Strategic Studies.org, <https://www.iiss.org/online-analysis/online-analysis//2022/12/japans-transformational-national-security-documents>
- Kshetri, Nir (2011). Cyber Security and International Relations: The US Engagement with China and Russia. *Cyber Politic Journal* 0 (1), 188-191.
- Lynn, S. M., & Jones. (2001). Does Offense-Defense Theory Have a Future . Canada: McGill University.
- Ministry of Foreign Affairs of Japan. (2022). National Security Strategy (NSS). [mofa.go.jp, https://www.mofa.go.jp/jp/siryou/131217anzenhoshou/nss-e.pdf](https://www.mofa.go.jp/jp/siryou/131217anzenhoshou/nss-e.pdf)
- Ministry of Defense. (2022). National Defense Strategy (NDS). [mod.go.jp, https://www.mod.go.jp/j/policy/agenda/guideline/strategy/pdf/strategy_en.pdf](https://www.mod.go.jp/j/policy/agenda/guideline/strategy/pdf/strategy_en.pdf)
- Ministry of Defense. (2022). Defense Buildup Program (DBP). [mod.go.jp, https://www.mod.go.jp/j/policy/agenda/guideline/plan/pdf/program_en.pdf](https://www.mod.go.jp/j/policy/agenda/guideline/plan/pdf/program_en.pdf)
- Mustofa, A. Z. (2020). Iran Defensive Attitudes Towards United States's Offensive Politic: Analisis of Iran Nuclear Development Programs. *Islamic World and Politics*, 4(1), 15-30.
- Nindya, A. P., & Abiyya, R. A. (2022). The Influence of AUKUS to Indo Pasific Regional Stability and Indonesian's Stance. *Politica*, 13(1), 67-84.
- Ryall, Julian. (2022). Pertahanan Jepang Diperkuat, Negara Tetangga Ricuh. *Deutsche Welle.com*, <https://amp-dw.com.cdn.ampproject.org/v/s/amp.dw.com/id/pertahanan-jepang-diperkuat/>
- Shipping, T. (2009). The Security Dilemma: A Conceptual Analisis. *Security Studies*, 18(5), 587-623.
- Syahrin, M. N. (2018). *Keamanan Asia Timur: Realitas, Kompleksitas dan Rivalitas*. Sleman: Komoyo Press.
- Tokuchi, Hideshi. (2023). Japan's New National Security Strategy: Background and Challenges. European University Institute, <https://cadmus.eui.eu/handle/1814/75779>
- Tokuchi, Hideshi. (2023). The Basic Orientation of Japan's National Security Strategy: International Security Cooperation with Enhanced Comprehensive National

Power. The Association of Japanese Institutes of Strategic Studies.
https://www.jiia.or.jp/en/ajiss_commentary/the-basic-orientation-of-japans-national-security-strategy.html

U.S. Department of Defense. (2023). 2023 Military and Security Developments Involving the Peoples Republic of China, <https://media.defense.gov/2023/Oct/19/2003323409/-1/-1/1/2023-MILITARY-AND-SECURITY-DEVELOPMENTS-INVOLVING-THE-PEOPLES-REPUBLIC-OF-CHINA.PDF>

Weinstein, Ken dan Yoshihisa Kita. (2023). Japan's Historic Defense Transformation Advice for New Entrants. Brunswick Geopolitical, <https://www.brunswickgroup.com/japan-s-historic-defense-transformation-i25470/>

Waltz, K. N. (1989). The Origins of War in Neorealist Theory. Cambridge: Cambridge University Press

Yasuyuki, Sugiura. (2023). Three trends in the PLA's military activities Around Taiwan. ThinkChina, <https://www-thinkchina-sg.translate.goog/three-trends-plas-military-activities-around-taiwan>